

ANALISIS KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI PENDEKATAN TEORI DIFUSI INOVASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Mgs. Ismail¹, Gatiniingsi², Udaya Madjid³,
Anya Risnawati⁴, Subiyono⁵, Joko Moersito⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

mgs_ismail@ipdn.ac.id

ABSTRACT

ANALYSIS OF CHILD IDENTITY CARD (KIA) OWNERSHIP USING THE DIFFUSION OF INNOVATION THEORY IN BOGOR REGENCY, WEST JAVA PROVINCE

*The Child Identity Card (*Kartu Identitas Anak* [KIA]) is considered an important instrument because, to date, there has been no official identity card specifically issued for children, despite the fact that they may already possess a birth certificate and/or a student identification card. The KIA is intended to protect the constitutional rights of children as citizens of the Republic of Indonesia. This study employed a qualitative descriptive research method designed to describe and explain phenomena occurring at the time the research was conducted. The method aims to provide a comprehensive, detailed, and in-depth description of the object or subject under investigation, reflecting the actual conditions observed during the study.*

This research adopts the Diffusion of Innovation Theory as its analytical framework, which examines the adoption of innovation from two perspectives: the characteristics of the innovation and the elements of the diffusion process itself. The findings indicate that, from the perspective of the innovation characteristics, the Child Identity Card (KIA) has not yet provided sufficient relative advantage, compatibility, or trialability to encourage public adoption. Furthermore, from the perspective of the diffusion process, the four elements of innovation diffusion—innovation, communication channels, time, and the social system—have not functioned effectively in promoting public participation in the implementation of the Child Identity Card program in Bogor Regency.

Keywords: Child Identity Card (KIA); Diffusion of Innovation Theory; Bogor Regency.

ABSTRAK

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga saat ini belum tersedia kartu identitas khusus bagi anak, meskipun anak telah memiliki akta kelahiran dan/atau kartu pelajar. KIA bertujuan melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung melalui deskripsi yang mendalam, luas, dan terperinci terhadap objek atau subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Difusi Inovasi yang meninjau inovasi dari dua sisi, yaitu karakteristik inovasi dan elemen-elemen yang melekat dalam proses difusi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi belum mampu mendorong masyarakat untuk memiliki KIA. Demikian pula, elemen-elemen difusi inovasi belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: kepemilikan; Kartu Identitas Anak (KIA); Teori Difusi Inovasi; Kabupaten Bogor; Provinsi Jawa Barat.

PENDAHULUAN

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akta kelahiran dan/atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. KIA pun memiliki kegunaan-kegunaan, seperti pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran sekolah, keimigrasian, pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan perdagangan anak. Hal itu merupakan hal yang melibatkan penyertaan KIA. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Keharusan penerbitan program KIA di atas selain merupakan inovasi dari akta kelahiran, juga merupakan sinyal merah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang perlindungan anak, memberi tahu kita bahwa pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi penggerak pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan hak anak serta melindunginya dalam kepemilikan identitas kependudukan, yang di dalam dokumen tersebut data yang tercatat terkoneksi secara nasional ke dalam Sistem Informasi dan Administrasi.

Menurut Dirjen Dukcapil Teguh, kembali menggarisbawahi bahwa target capaian pelayanan Dukcapil tahun ini yaitu 99, 4 persen cakupan perekaman KTP-el, 50 persen kepemilikan KIA, 98 persen akta kelahiran, 75 persen Buku Pokok Pemakaman, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan akses data dengan minimal 15 OPD, 2 inovasi per tahun, dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 25 persen dari total cakupan perekaman KTP-el.

Berdasarkan data pelaporan per 15 Maret 2023, daerah yang telah mencapai target nasional yaitu untuk perekaman KTP-el ada 4 Dinas Dukcapil di Provinsi Lampung, Sulsel, Sumbar, dan DKI Jakarta. Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), 15 daerah mencapai target yaitu Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, DIY, Bengkulu, Babel, Lampung, Bali, Sumbar, Kepri, Sulsel, Kalsel, Gorontalo, Kaltara, Jateng, dan Jatim.

Cakupan akta kelahiran target diraih 23 Disdukcapil, yakni Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bengkulu, Babel, DIY, Sumbar, NTB, Kalteng, Bali, Jateng, Kaltim, Kepri, Sulsel, Lampung, Sumsel, Sultra, Maluku, Jatim, Riau, Sulut, Jabar, Kalsel, dan Aceh.

Untuk penggunaan Buku Pokok Pemakaman target dicapai 7 Disdukcapil, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalbar, Sumbar, DIY, Sulut, dan Riau. Target PKS Pemanfaatan Data dicapai 3 daerah, yaitu Disdukcapil Provinsi Aceh, Sumbar, dan Lampung. Akses data diperoleh 5 Disdukcapil, yaitu Provinsi Lampung, Jabar, Jateng, DIY, dan Kalbar. Teguh menyampaikan pula bahwa IKD atau KTP digital adalah kebijakan nasional yang secara bertahap akan menggantikan KTP-el. Sehingga seluruh Kepala Dinas Dukcapil harus mengupayakan tercapainya target 25 persen dari total perekaman.

Dari data di atas menunjukkan bahwa Jawa Barat belum termasuk salah satu dari 15 daerah yang telah

Tabel 1

Capaian Pelayanan KIA Seluruh Disdukcapil Se Jawa Barat (Per 31 Juli 2022)

NO	KAB/KOTA	JUMLAH	%
PROVINSI		5.892.800	42,93
1	KOTA CIMAH	139.263	95,09
2	KOTA SUKABUMI	20.960	89,67
3	MAJALENGA	295.027	88,86
4	KOTA BANJAR	45.275	86,11
5	KOTA DEPOK	387.159	74,73
6	PANGANDARAN	61.303	54,90
7	PURWAKARTA	187.868	81,18
8	KOTA TASIKMALAYA	118.703	59,45
9	TANJUNGPURA	298.141	58,91
10	KUNINGAN	170.266	54,57
11	KOTA BANDUNG	334.337	54,07
12	KARAWANG	348.482	53,91
13	KOTA BOGOR	147.387	53,14
14	KOTA CIREBON	82.827	50,91
15	INDRAMAYU	161.527	49,26
16	CIANJUR	170.687	49,18
17	BEKASI	424.614	45,21
18	SUMEDANG	129.560	44,13
19	KOTA BEKASI	277.097	43,83
20	SUKABUMI	307.529	38,78
21	SUBANG	147.450	37,41
22	BANDUNG	383.652	35,98
23	CIMAS	106.593	35,05
24	CIREBON	182.981	30,46
25	BOGOR	472.187	29,82
26	BANDUNGBARAT	131.873	26,84
27	GARUT	198.830	23,66

mencapai target pencapaian 50 persen kepemilikan Kartu Identitas Anak.

Untuk Provinsi Jawa Barat, dalam hal peringkat kepemilikan KIA berdasarkan tingkat persentase antarkabupaten atau kota di Jawa Barat ditunjukkan pada tabel di atas.

Dengan rendahnya persentase yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor, perlu dilakukan penelitian atau kajian yang lebih mendalam dengan fokus pada analisis kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Konsep penelitian kualitatif dikemukakan oleh banyak ahli, antara lain Jonker & Pennink (2009: 72), Strauss dan Corbin (2013: 4), dan Creswell (2018: 4). Dari ketiga konsep tersebut menjelaskan bahwa kajian dari penelitian kualitatif adalah sejumlah individu atau sekelompok orang atau organisasi tertentu, untuk memahami makna dan fenomena yang terjadi dari sudut pandang semua pihak yang terlibat, dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan

terorganisasi dalam mendapatkan informasi serta temuan yang dihasilkan bukan dalam bentuk hitungan atau statistik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini mampu menggambarkan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Di samping itu, metode ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang diteliti dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Data-data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, mean (rata-rata), dan perhitungan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepemilikan KIA Ditinjau dari Tiori Difusi Inovasi

Tingkat kelahiran yang terus meningkat seharusnya meningkat sejalan dengan

kepemilikan KIA. Hal ini untuk lebih mendalami kepemilikan KIA. Dalam penelitian ini yang berlokasi di Kabupaten Bogor akan ditinjau dengan Teori Difusi Inovasi yang menggunakan empat elemen, yaitu: 1. Inovasi, 2. Saluran komunikasi, 3. Jangka waktu, dan 4. Sistem sosial

Inovasi

Inovasi merupakan gagasan, ide, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sesdikdukcapil) Kabupaten Bogor, beliau mengatakan:

“Untuk Kab. Bogor dalam pelayanan yang dilakukan oleh Dinas mengenai akta kelahiran sampai mencapai 300/hari, dan KTP 1.000/hari, baik cetak, rekam, maupun ganti KTP. Kaitan dengan KIA, rata-rata 200/hari dicetak, kemudian akta kematian, pindah datang, sangat padat pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil. Untuk KIA satu paket, masyarakat mengajukan permohonan akta kelahiran yang usianya masih di bawah 17 tahun langsung diproses KIA-nya. Ada pelayanan *Three in One* yaitu: mengubah dulu KK (Kartu Keluarga), ada penambahan anggota, membuat akta kelahiran, dan kemudian membuat satu paket dengan KIA, sehingga masyarakat akan merasa senang pada saat mengajukan akta kelahiran. Tidak memohon KIA tetap dibuatkan KIA-nya, karena ada istilah pelayanan *Three in One*, inilah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian dari pelayanan tadi, baik akta/KIA tidak dipungut biaya (gratis), berdasarkan kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan Impola, kaitan dengan jumlah penduduk, penduduk di Bogor sekitar 5, 6 juta jiwa, oleh karena itu dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dan

pendekatan pelayanan, kita ada 7 UPT yang membawahi rata-rata tiap UPT 5–6 kecamatan, jumlah kecamatan ada 40 lebih. UPT ini memberikan layanan berkaitan dengan KIA, akta kelahiran, dan lain sebagainya. UPT memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk lebih efisien bagi masyarakat dalam rangka mengurus Adminkuk di wilayah Kabupaten Bogor. Sekarang ada keseimbangan antara KIA dengan akta kelahiran. Kalau dulu masyarakat belum mengenal dan tahu ada KIA, sekarang kita terus-terusan melakukan sosialisasi, sehingga ketika masyarakat datang ke kita, baik ke UPT maupun layanan akta, langsung oleh kita secara otomatis dibuatkan KIA-nya. Pemerintah sudah memberikan kemudahan, tinggal kita gencar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Identitas kependudukan itu sangat diperlukan minimal pada taraf ekonomi mereka sudah menikah.”

Setelah wawancara dengan Sekdis dilanjutkan dengan tanggapan atau respons dari Kasubag Pelayanan Disdukcapil (Adie Kurniawan) yang mengatakan,

“Untuk KIA mendorong sedikit kesulitan karena belum menjadi primadona.”

Pak Kasubag juga menambahkan bahwa, “Bogor tiap tahun tren jumlah penduduknya bertambah terus-menerus. Target KIA tahun ini ditargetkan 60%, sedangkan pencapaian sampai bulan Maret ini 30, 5%.”

Selain itu beliau menginformasikan bahwa,

“Kita juga mencoba bekerja sama dengan beberapa instansi atau merchant lainnya agar bisa dimanfaatkan dan menarik, seperti pada tahun 2019, sempat kita mendapat potongan dari Taman Safari, tempat wisata, rumah makan, dan juga bekerja sama dengan Bank Jabar agar

Tantangan Adopsi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bogor



Ilustrasi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh belum optimalnya karakteristik inovasi dan elemen difusi inovasi.

dijadikan sebagai dasar pembuatan rekening biar memacu anak-anak kecil.”

Ada juga respons dari informan penelitian ini yaitu Bapak Hendra, Kaunit UPT Ciawi, yang mengatakan bahwa,

“Terkait pelayanan KIA/akta, secara ketentuan nanti pada saat orang tuanya minta dibuatkan akta langsung dibuatkan sepanjang persyaratan terpenuhi.”

Dari masyarakat dalam pertemuan tim penelitian ini di tempat pelayanan UPT Ciawi yang diwakili oleh Ibu Pratiwi sebagai juru bicara masyarakat yang sedang mengurus dokumen kependudukan mengatakan bahwa,

“Saya punya KIA untuk anak saya yang saya buat sejak dia berumur 2 bulan dan sekarang anak saya sudah kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Saya tidak pernah menggunakannya untuk registrasi masuk sekolah, cukup akta kelahiran pada saat masuk sekolah, dan sampai saat ini sudah hangus karena sudah lama tidak dipergunakan. Di samping itu, ada salah satu ibu lain yang memberi tanggapan bahwa, saya tidak punya KIA dan itu apa serta digunakan untuk apa.”

Dari respons-respons yang peneliti dapat di atas ini menggambarkan ide baru atau inovasi yang diciptakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, belum terlalu mendasar penerimaannya dalam membangun kepemilikan.

Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi dalam Difusi Inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang dituju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massal, dan sebaliknya jika yang dituju adalah seorang individu maka yang digunakan adalah komunikasi personal.

Pada penelitian ini, dari hasil wawancara dengan Pak Iwan Setiawan (Staf Ahli UPT Cileungsi) mengatakan,

“Untuk sosialisasi terkait KIA kepada masyarakat, sudah sering sekali memberikan materi dan pembahasan agar masyarakat tersebut dapat

mengerti apa itu KIA dan apa gunanya KIA, tapi hambatannya adalah tidak semua masyarakat dapat mengerti soal KIA (mungkin terkait umur, kegunaan, dsb.).”

Dan dari masyarakat sebagai pengguna dikatakan oleh Bu Cici bahwa,

“Kami tahu pada saat kita mengurus akta kelahiran dan kita diberi tahu bahwa akan mendapat 3 buah dokumen kependudukan yaitu: 1) akta kelahiran, 2) KK baru, dan 3) KIA. Yang ini merupakan program Three in One.”

Jadi dari 2 hasil wawancara ini memunculkan bahwa sistem penyampaian pesan ke masyarakat termasuk komunikasi massal. Komunikasi tentang pelayanan dokumen kependudukan ini juga penyampaiannya kepada masyarakat dilakukan oleh UPT Ciawi. Bapak Hendra memasang spanduk di depan pelayanan, tepatnya di atas teras depan pelayanan, tetapi pemasangannya sudah sangat lama sekali sehingga sudah kelihatan rusak atau pudar. Beliau mengatakan bahwa,

“Pembuatan spanduk ini adalah inisiatif sendiri dan biaya sendiri.”

Saluran komunikasi ini berjalan bersama-sama dengan kebijakan pembentukan UPT, yaitu membagi wilayah yang sangat luas ini dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Jabodetabek, dengan memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain, yaitu sebesar 42,34%. Atau 2 kali lipat dari Kabupaten Bekasi dan 4 kali dari DKI Jakarta.

Jangka Waktu

Jangka waktu dalam difusi inovasi ini merupakan sebuah proses keputusan, mulai dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima ataupun menolak. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Keinovatifan seseorang dapat relatif

lebih awal atau lebih lambat ketika menerima inovasi, begitu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial.

Dari definisi ini menunjukkan gambaran waktu yang dipakai dalam mengirimkan inovasi penggunaan KIA di kalangan masyarakat yang mempunyai anak yang berumur 0 sampai 5 tahun dan anak yang berumur 6 sampai 16 tahun yang KIA-nya dilengkapi dengan foto, membutuhkan waktu yang panjang. Di kalangan masyarakat rentang waktu ini tidak begitu jelas, dan di kalangan pemerintah sebagai sumber penyedia layanan hanya menentukan target, dan ini berdasarkan prioritas, artinya setelah dokumen lain tercapai baru dokumen KIA ditargetkan.

Hal ini dapat dilihat lagi dari hasil wawancara di atas dengan Kasubag Pelayanan Disdukcapil (Adie Kurniawan) yang mengatakan,

“Target KIA tahun ini ditargetkan 60%, sedangkan pencapaian sampai bulan Maret Tahun 2024 baru mencapai 30,5%.”

Penggunaan jangka waktu yang dimiliki masyarakat yang diberikan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, baru didominasi oleh target pencapaian. Masyarakat belum secara keseluruhan paham mengenai KIA dan KIA belum berdampak pada hal yang urgen di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan di atas yaitu Bu Cici dan Pak Iwan.

Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama.

Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi. Masyarakat dapat menerima maupun menolak suatu inovasi tersebut.

Dari gambaran yang didapat melalui wawancara dengan narasumber, dalam hal ini yaitu Disdukcapil Kabupaten Bogor, yaitu Sesdukcapil Bapak Khaeruni Pelani,

“Terkait dengan jumlah penduduk, penduduk di Bogor sekitar 5, 6 juta jiwa, oleh karena itu dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat dan pendekatan pelayanan kita ada 7 UPT yang membawahi rata-rata tiap UPT 5–6 kecamatan, jumlah kecamatan ada 40 lebih. UPT ini memberikan layanan berkaitan dengan KIA, akta kelahiran, dan lain sebagainya. UPT memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk lebih efisien bagi masyarakat dalam rangka mengurus Admuduk di wilayah Kabupaten Bogor.”

Beliau menambahkan,

“Untuk sistem sosial yang menjadi sasaran adalah kita gencar mencetak KIA bagi anak umur di bawah 5 tahun, jadi kita sebar ke desa-desa (jadi tidak perlu menghadirkan yang bersangkutan). Sampai saat ini masih terus kita lakukan upaya peningkatan tersebut agar bisa signifikan untuk mendongkrak persentase target tahun ini.”

Pak juga menambahkan untuk mendukung keberhasilan ini, katanya,

“Kita juga mencoba bekerja sama dengan beberapa instansi atau merchant lainnya agar bisa dimanfaatkan dan menarik, seperti pada Tahun 2019, sempat kita mendapat potongan dari Taman Safari, tempat wisata, rumah makan, dan juga bekerja sama dengan Bank Jabar agar dijadikan sebagai dasar pembuatan rekening biar memacu anak-anak kecil.”

KIA di mata masyarakat sehingga mendorong atau memotivasi masyarakat

untuk memiliki atau membuat KIA. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh inovasi itu sendiri, yang dalam hal ini adalah KIA. Ada empat (4) karakteristik yang mendorong masyarakat untuk memiliki inovasi tersebut.

Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Pembuatan KIA ini dilaksanakan melalui program Three in One . Ini dilaksanakan pada saat masyarakat mendaftarkan untuk pembuatan akta kelahiran, mereka akan langsung mendapatkan tiga dokumen kependudukan yaitu perbaikan KK, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Ini mereka terima tanpa terlebih dahulu muncul kesadaran akan kebutuhan terhadap dokumen ketiga.

Kesesuaian (*Compatibility*)

KIA yang mereka terima secara sadar itu dikarenakan langsung diterima pada saat mereka mengurus akta kelahiran. Mereka mendapat penjelasan bahwa KIA merupakan duplikat yang dapat dibawa-bawa ke mana-mana dan dapat disimpan di dompet, tetapi penggunaan atau manfaatnya masih tahap berkoordinasi dengan bidang terkait sesuai kebutuhan pengguna atau pemegang kartu.

Kerumitan (*Complexity*)

Dengan diterimanya secara langsung tanpa mengisi dan mendaftarkan pembuatan Kartu Identitas Anak, serta dari segi ukuran yang lebih kecil dan sederhana dibanding akta kelahiran, maka tidak ada yang menyulitkan dalam bidang penyimpanan dan penempatannya.

Dapat Diuji Coba (*Trialability*)

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Dukcapil, masih tahap berkoordinasi dengan bidang terkait dalam hal pemanfaatannya bagi pemilik Kartu Identitas Anak, hanya untuk bidang perlindungan anak di mata

hukum dan sebagai kartu pengenalan identitas anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan pendekatan Teori Difusi Inovasi, yang dalam gambarannya melihat dua sisi yaitu sisi karakteristik dan sisi elemen yang melekat pada inovasi itu sendiri, maka:

Pada sisi karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut.

Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Pada karakteristik ini *advantage* yang dirasakan user sedikit sekali dan tampak samar-samar. Hal ini *user* hanya baru memahami dan menggunakannya yaitu dari bentuk akta kelahiran yang besar, yang tidak bisa dimasukkan dalam saku pengguna, menjadi bisa disimpan di saku dan dibawa ke mana-mana.

Kesesuaian (*Compatibility*)

Pada karakteristik kesesuaian ini pengguna belum merasakan dan menemukan inovasi yang tepat dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan *sehari-hari*.

Dapat Diuji Coba (*Trialability*)

Untuk menguji coba inovasi ini baru bisa pada tahap dapat dibawa ke mana-mana dan belum bisa digunakan di lingkungan komersial.

Dan untuk segi elemen yang ada pada inovasi itu yang meliputi empat elemen yang melekat, yaitu inovasi, jalur komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial dalam mempercepat kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor, faktor-faktor penarik apa saja yang menyebabkan orang tua atau masyarakat mengurus untuk mendapatkan KIA bagi anaknya.

Inovasi

Pada elemen ini tampak ide atau gagasan yang baru belum begitu tampak di masyarakat secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Elemen ini merupakan pelengkap yang diterima langsung pada saat mereka mengajukan akta kelahiran tanpa disadari masyarakat mendapatkan inovasi tersebut.

Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi yang dipakai tidak muncul dan tidak jelas. Karena masyarakat tahu pada saat menghadapi pelayanan Three in One, sehingga bagi keluarga yang sudah memilikinya tidak ada yang kembali memperbarui KIA yang mereka sudah terima akibat mengurus akta kelahiran, yang langsung mereka terima.

Jangka Waktu

Maksud jangka waktu di sini merupakan pengambilan keputusan untuk memiliki KIA yang ada di masyarakat sejak inovasi ini ada, namun belum jelas. Mereka hanya menerima satu dokumen tambahan pada saat mereka mengurus akta kelahiran anaknya yang baru lahir.

Sistem Sosial

Pada tingkat sistem sosial, masyarakat yang ditarget begitu besar dengan posisi yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas untuk membentuk sistem sosial ini. Sistem sosial ini baru terbentuk pada saat memiliki atau baru melahirkan anak dan mengurus dokumen akta kelahirannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor**, perlu meningkatkan nilai manfaat (relative advantage) Kartu Identitas Anak (KIA) melalui perluasan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, perbankan, tempat wisata, serta pelaku usaha sehingga KIA memiliki manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dilakukan penguatan sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi, baik media massa, media sosial, situs resmi pemerintah, pelayanan publik, maupun melalui pemerintah desa, sekolah, Posyandu, Puskesmas, dan kader PKK agar masyarakat memahami fungsi, manfaat, serta pentingnya kepemilikan KIA.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengembangkan berbagai inovasi pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, seperti pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, pelayanan terpadu dengan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi layanan digital sehingga kepemilikan KIA dapat meningkat secara lebih merata.
4. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dunia usaha dalam mendukung pemanfaatan KIA sebagai identitas anak pada berbagai pelayanan publik sehingga keberadaan KIA tidak hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi juga memiliki fungsi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
5. Perlu disusun strategi komunikasi yang lebih terarah berdasarkan karakteristik masyarakat Kabupaten Bogor, mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar memerlukan pendekatan sosialisasi yang berbeda pada setiap wilayah pelayanan.
6. Untuk meningkatkan efektivitas difusi inovasi, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program KIA, terutama pada aspek inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu pencapaian target, dan sistem sosial, sehingga hambatan implementasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kepemilikan KIA menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), sehingga dapat mengukur pengaruh masing-masing dimensi Teori Difusi Inovasi terhadap tingkat kepemilikan KIA serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan implementasi program.

DAFTAR RUJUKAN

- Bardi, Syamsul, 2009, *Demografi Umum*, Yayasan PeNa Banda Aceh.
- Creswell, Jhon W. (2018). *Research Design Pendekatan Kualitatif, dan Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friese, Zusanne, 2019. *Qualitatif Data Analysis With Atlas.ti*. Sage Publication. Los Angeles.
- Gibbs, G. R., 2007. *Thematic Coding and Categorizing*. Dalam *Analyzing Qualitative Data*. SAGE Publications Ltd., London. <http://dx.doi>.
- Malhotra, N., & Birks, D. (2007). *Marketing Research: An Applied Approach*. Prentice Hall.
- Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). *Communication of Innovations: A Cross-cultural Approach*. New York: Free Press.

- Rogers, E. M., & Kincaid, L. (1981). *Communication Network: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovation* (Third ed.). New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations* (4th ed.). New York: Free Press.
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Said, 2012, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LPEES, Jakarta.
- Sholahuddin. (2017). Pengaruh Karakteristik Inovasi terhadap Niat Mengadopsi Solopos e-paper. *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Straus dan Juliet Corbin, 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). *User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View*. MIS Quarterly .
- Wang, Y.-B., Lin, K.-Y., Chang, L., & Hung, J. C. (2011). *A Diffusion of Innovations Approach to Investigate the RFID Adoption in Taiwan Logistic Industry*. *Journal of Computers*, Vol. 6(No. 3).
- Wulandari, D., Bangsawan, S., & Bursan, R. (2017). Pengaruh Inovasi Produk (Keuntungan Relatif, Kompatibilitas, dan Kompleksitas) terhadap Niat Penggunaan Mobile Banking BRI (Studi pada Agen LPG 3 kg di Bandar Lampung). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 13(No. 3), 227–238.
- Yunus, M. (2014). Diffusion of Innovation, Consumer Attitudes and Intentions to Use Mobile Banking. *Journal of Information and Knowledge Management*, Vol. 4(No. 10).

Peraturan Perundang-Undangan

- Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.